

EVALUASI KINERJA PROGRAM UPSUS PADI DI KABUPATEN KLATEN: KINERJA, KENDALA, DAN STRATEGI

Evaluation of Upsus Program on Rice in Klaten Regency: Performance, Constraints, and Strategies

Saptana¹, A. Supriyo², H.P. Saliem¹

¹Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Jln. A. Yani No. 70, Bogor 16161

²Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah, Jln. BPTP No. 40, Sidomulyo, Ungaran 50519
E-mail: saptono_07@yahoo.co.id

ABSTRACT

Agriculture for development becomes an interesting issue throughout the history of human life. Development of food, especially rice, is a priority in national program. The purpose of this paper is to evaluate the performance of the implementation of the programs supporting Upsus-Rice. This research was conducted in Klaten Regency during March 2014-September 2015. Implementation of Upsus-Rice Program has shown good performance in terms of achievement aspects of planting area, harvested area performance, productivity, and production. One aspect that still had less attention was the empowerment of farmers. However, the implementation was still facing problems of both technical, economic, and institutional. The implementation of Program Upsus-Rice needs improvement, in both program implementation, supporting program aspect, and promotional aspect. Future policy strategy is the importance of farmer empowerment in the implementation of Upsus-Rice Program, in the aspects of both technical skill and managerial capability.

Keywords: *rice, Upsus, program, evaluation, policy, Klaten*

ABSTRAK

Pertanian untuk pembangunan menjadi isu menarik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Pembangunan pangan khususnya padi menjadi prioritas dalam program nasional. Tujuan makalah ini adalah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program-program pendukung Upsus Padi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten selama bulan Maret 2014-September 2015. Kinerja implementasi Program Upsus Padi sudah menunjukkan kinerja yang baik ditinjau dari aspek capaian luas tanam, capaian luas panen, produktivitas, dan produksi. Salah satu aspek yang masih kurang mendapatkan perhatian adalah aspek pemberdayaan petani. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih menghadapi permasalahan-permasalahan, baik teknis, ekonomi, maupun sosial kelembagaan. Implementasi Program Upsus Padi memerlukan penyempurnaan, baik dalam aspek pelaksanaan program, aspek program pendukung, maupun aspek promosi. Strategi kebijakan ke depan adalah pentingnya aspek pemberdayaan petani dalam pelaksanaan Program Upsus Padi, baik dari aspek keterampilan teknis maupun kapabilitas manajerialnya.

Kata kunci: *padi, Upsus, program, evaluasi, kebijakan, Klaten*

PENDAHULUAN

Pada "Forum on How to Feed the World in 2050" yang diselenggarakan oleh FAO di Roma bulan Oktober 2009 dibahas urgensi baru pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*) (FAO 2009). Hal ini dilandasi bahwa terjadinya krisis ekonomi mendorong adanya peningkatan penggunaan sumber daya pertanian untuk pembangunan. Paradigma baru pembangunan pertanian harus mencakup aspek pertumbuhan (peningkatan produksi), aspek pemerataan (kesempatan kerja dan berusaha), dan aspek keberlanjutan (ekologi).

Pangan merupakan kebutuhan mendasar manusia dan merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh setiap individu. Di Indonesia, pemenuhan kebutuhan pangan penduduk sampai ke tingkat individu dituangkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012. Dalam kerangka itulah pemenuhan pangan utamanya pangan pokok menjadi prioritas pembangunan ekonomi di setiap tahapan pembangunan nasional. Dalam pemerintahan kabinet kerja periode 2015-2019, pembangunan ekonomi nasional mengacu pada Nawa Cita (9 agenda prioritas pembangunan nasional) di mana salah satunya adalah terwujudnya kedaulatan ekonomi termasuk di dalamnya pencapaian kedaulatan pangan.

Kebijakan dalam pembangunan pertanian bersifat paradoksal dan ada di mana-mana seperti yang dikemukakan Gardner (1987) dan Simatupang (2003), *agricultural policy is ubiquitous and contentious*. Di satu sisi, kebijakan pertanian sangat dibutuhkan, namun di sisi lain setiap kebijakan pertanian dapat dijustifikasi dengan argumen yang berbeda-beda dan dampaknya bersifat dilematis (Timmer et al. 1983; Simatupang 2003). Kebijakan pertanian umumnya tergolong kebijakan redistributif atau *Political Economic Seeking Transfers* (PEST) sehingga merupakan isu ekonomi-politik (Rausser 1982; Rausser 1992; Pope dan Hallam 1986; Simatupang 2003). Argumen pokok pentingnya kebijakan pembangunan pertanian dirancang dengan seksama melalui suatu analisis kebijakan yang komprehensif.

Dalam mengimplementasikan terwujudnya kedaulatan pangan maka pemenuhan kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri menjadi prioritas dalam pembangunan pertanian. Di antara berbagai komoditas pangan penting yang menjadi prioritas kabinet kerja adalah tercapainya swasembada berkelanjutan untuk padi, jagung, dan swasembada kedelai yang ditargetkan terwujud di tahun 2017.

Dalam rangka pelaksanaan program peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai tahun 2015 maka diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian RI dalam Permentan No. 03/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Upsus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya 2015. Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai melalui kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), optimasi lahan, Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi, Jagung, dan Kedelai, serta bantuan alat dan mesin pertanian serta pengawalan/pendampingan.

Untuk melaksanakan Program Upsus Padi, Jagung, dan Kedelai tersebut, pemerintah Kabupaten Klaten telah melaksanakan serangkaian koordinasi dan sinkronisasi dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Pelaksana utama pemerintah kabupaten dalam program ini adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Koordinator Jabatan Fungsional (KJF) atau Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (Bapeluh), dan Kodim Kabupaten Klaten. Tujuan penulisan ini adalah melakukan evaluasi pelaksanaan program-program pendukung Upsus Padi. Secara rinci ditujukan untuk 1) melihat potensi pertanaman padi; 2) mengkaji kinerja pelaksanaan program-program pendukung Upsus Padi; 3) mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Upsus Padi; dan 4) melihat prospek dan strategi kebijakan Program Upsus Padi, Jagung, dan Kedelai ke depan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Klaten. Desa dan kecamatan terpilih merupakan daerah sentra produksi dan lokasi-lokasi kegiatan pendukung Program Upsus Padi, yaitu Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), optimasi lahan, gerakan penerapan-pengelolaan tanaman terpadu (GP-PTT), dan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Waktu penelitian dilakukan dari Januari 2014 hingga September 2015.

Sumber dan Jenis Data

Untuk mendukung kelengkapan data dan informasi dalam penelitian analisis kebijakan Program Upsus mendukung swasembada padi maka ada beberapa data yang dibutuhkan, baik berupa data primer maupun data sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui berbagai dokumen dari Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, BPS Kabupaten Klaten, dan instansi pemerintah terkait. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa kelompok sasaran penerima program pendukung Program Upsus mendukung swasembada padi di Kabupaten Klaten. Wawancara juga dilakukan terhadap Dinas Pertanian, Koordinator Penyuluh Pertanian (KJF), Mantri Tani dan PPL, perangkat desa, serta gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok tani, dan kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Metode Analisis

Untuk menjawab tujuan pertama, yaitu “melihat potensi pertanaman padi” diperlukan data sekunder potensi sumber daya pertanian, perkembangan luas lahan pertanian, kondisi iklim, dan informasi pendukung lainnya. Analisis data dan informasi dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan tabulasi silang.

Untuk menjawab tujuan kedua, yaitu “mengkaji kinerja pelaksanaan program-program pendukung Upsus Padi” diperlukan informasi berupa data capaian luas tanam, luas panen, produktivitas, dan capaian produksi padi. Berdasarkan data yang dikumpulkan BPS dan Dinas Pertanian dapat diketahui capaian Program Upsus Padi serta peluang peningkatan kapasitas produksi ke depan.

Untuk menjawab tujuan ketiga, yaitu “mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Upsus Padi” digali dari berbagai *stakeholder* terkait, seperti Dinas Pertanian, KJF, UPTD, Mantri Tani, dan PPL, serta kelompok sasaran program. Dengan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pelaksanaan program maka diharapkan akan dapat disusun strategi kebijakan melalui penyempurnaan kegiatan pendukung Program Upsus Padi.

POTENSI WILAYAH UNTUK PERTANAMAN PADI DI KABUPATEN KLATEN

Potensi Lahan Pertanian

Luas wilayah Kabupaten Klaten seluas 65.556 ha terdiri atas lahan sawah 33.220 ha (50,67%), bukan sawah 6.581 ha (10,04%), dan lahan bukan pertanian 25.755 ha (39,29%). Rata-rata luas lahan sawah pada periode (2009–2013) sebesar 33.344 ha, namun perkembangan luas lahan sawah di Kabupaten Klaten mengalami sedikit penurunan dengan laju sebesar -0,14 %/tahun sehingga pada tahun 2014 tinggal 33.326 ha. Informasi secara terperinci tentang perkembangan luas wilayah Kabupaten Klaten menurut jenis lahan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas wilayah menurut jenis lahan di Kabupaten Klaten, 2009–2013

Tahun	Lahan sawah	Lahan bukan sawah	Lahan bukan pertanian	Total lahan
2009	33.412	6.384	25.760	65.556
2010	33.398	6.383	25.775	65.556
2011	33.374	6.384	25.798	65.556
2012	33.314	6.396	25.856	65.556
2013	33.220	6.581	25.755	65.556
Rata-rata	33.344	6.426	25.789	65.556
Trend (%/tahun)	-0,14	0,77	0,00	0,00

Sumber: BPS Kabupaten Klaten (2014), diolah

Potensi Lahan Sawah

Luas lahan sawah di Kabupaten Klaten pada tahun 2013 seluas 33.220 ha terdiri atas lahan sawah irigasi teknis seluas 19.097 ha (57,49%), sawah setengah teknis seluas 10.430 ha (31,40%), sawah irigasi sederhana seluas 2.038 ha (6,13%), dan sawah tadah hujan seluas 1.665 ha (5,01%). Rata-rata luas lahan sawah pada periode 2009–2013 sebesar 33.344 ha, namun perkembangan luas lahan sawah di Kabupaten Klaten mengalami penurunan sebesar -0,14%/tahun. Informasi secara terperinci tentang perkembangan luas lahan sawah Kabupaten Klaten menurut tipe irigasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan luas lahan sawah menurut jenis irigasi di Kabupaten Klaten, 2009–2013

Tahun	Teknis	½ Teknis	Sederhana	Tadah hujan	Jumlah
2009	19.193	10.099	2.657	1.463	33.412
2010	19.859	9.877	2.441	1.221	33.398
2011	19.210	10.439	2.068	1.657	33.374
2012	19.119	10.443	2.038	1.714	33.314
2013	19.097	10.430	2.038	1.665	33.220
Rata-rata	19.296	10.258	2.248	1.544	33.344
Trend (%/tahun)	-0,10	0,85	-6,22	4,94	-0,14

Sumber: BPS Kabupaten Klaten (2014)

Hasil kajian terhadap distribusi luas lahan sawah menurut tipe irigasi di Kabupaten Klaten diperoleh informasi bahwa luas lahan sawah terluas dijumpai di Kecamatan Cawas dengan luas mencapai 2.318 ha, sedangkan terkecil ditemukan di Kecamatan Kemalang hanya seluas 54 ha. Jika hanya ditinjau dari luas lahan sawah irigasi teknis maka luas lahan sawah irigasi teknis terluas dijumpai di Kecamatan Wonosari seluas 1.998 ha, sedangkan terkecil ditemukan di Kecamatan Jatinom hanya seluas 41 ha.

Kondisi Tanah dan Iklim

Berdasarkan pada sifat tanah dan tipe iklim terdapat empat jenis agroekosistem sebagai basis pengembangan pola pertanaman dalam setahun yang dapat dilakukan sebagai berikut (Disperta Klaten 2013):

- 1) lahan sawah irigasi dengan ketersediaan air irigasi 10–12 bulan dapat dikembangkan pola tanam: a) padi sawah-padi sawah-padi sawah. Pola ini dianjurkan pada kondisi kesulitan drainase, dengan kewajiban menggunakan VUTW dan pengembalian bahan organik tanaman atau pemakaian kompos dan pergiliran varietas; b) padi sawah-padi sawah-palawija/sayuran;
- 2) lahan sawah irigasi dengan jaminan ketersediaan air irigasi 7–9 bulan dapat dikembangkan pola tanam: a) padi sawah-padi sawah walik jerami-palawija/sayuran; b) padi sawah-palawija/sayuran-palawija/sayuran;
- 3) lahan sawah irigasi dengan ketersediaan air irigasi 5–6 bulan terutama pada lahan sawah irigasi setengah teknis dan irigasi sederhana dapat dikembangkan pola tanam: a) padi gogo rancak-padi sawah walik jerami-palawija; b) palawija-padi sawah-palawija/sayuran; c) padi sawah-palawija/sayuran; dan
- 4) lahan sawah tadah hujan dapat dikembangkan pola tanam: a) padi gogo rancak-padi sawah-kacang tunggak; b) padi sawah-palawija/sayuran-bera; c) padi gogo rancak-palawija-palawija/sayuran; dan c) budi daya usaha tani dengan sistem surjan.

KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM UPSUS PADI DI KABUPATEN KLATEN

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)

Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) wilayah Kabupaten Klaten dengan sasaran areal 4.000 ha yang terdistribusi pada 22 kecamatan, 89 desa yang melibatkan 89 kelompok tani/P3A. Secara agregat kabupaten, realisasi Program RJIT untuk dana *refocusing* hingga bulan September 2015 telah mencapai target 100%, sedangkan APBNP baru mencapai 80–90%. Pencapaian realisasi Program RJIT dilokasi-lokasi yang dikunjungi (Kecamatan Prambanan, Karananom, Ceper, dan Kalikotes) untuk dana *refocusing* sudah mencapai (100%), sedangkan untuk dana APBNP bervariasi (80–95%) karena tidak semua kelompok P3A sudah memiliki akte notaris. Pencapaian Program RJIT di Kabupaten Klaten tergolong baik karena P3A sudah berstatus memiliki akte notaris dan pemerintah kabupaten berani mengambil keputusan dalam mencairkan program bantuan RJIT.

Di dalam pelaksanaan pembangunan RJIT yang bersumber dari dana *refocusing* dilakukan secara swakelola, sedangkan yang bersumber dari APBN melalui pihak ketiga (rekanan). Dalam kinerja pelaksanaannya maka pola swakelola dipandang lebih efektif dan efisien karena ada komponen swadaya masyarakat. Bentuk swadaya yang diberikan adalah berupa tenaga kerja untuk kegiatan pembersihan saluran irigasi, penebangan pohon-pohon dipinggir saluran, penggalian pondasi bangunan, dan mengangkut material. Dengan demikian, terjadi efisiensi penggunaan anggaran sehingga hasil dari efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk meningkatkan volume atau untuk menutupi adanya kenaikan harga-harga material. Dengan demikian, volume capaian target melalui swakelola lebih dari 100%. Sementara itu, pembangunan RJIT yang bersumber dari dana APBNP dilakukan melalui pihak ketiga dengan realisasi sesuai target dengan kualitas sesuai spesifikasi yang ditentukan.

Optimasi Lahan (Opla)

Program optimalisasi lahan seluas 500 ha dan telah realisasi 100%. Bentuk paket yang diterima kelompok tani penerima program adalah berupa uang kas sejumlah Rp24 juta, yang diperuntukkan untuk 1) pengadaan pupuk organik sebesar Rp10.800.000 atau 18 ton; 2) pengadaan pupuk Ponska Rp9.200.000 atau 80 sak atau 4 ton; dan 3) biaya pengolahan lahan sebesar Rp4.000.000 (Disperta Klaten 2015).

Secara umum, kelompok penerima Program Opla mengetahui tujuan dari adanya Program Opla yaitu untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi. Dari hasil wawancara dengan kelompok tampak Program Opla di Kabupaten Klaten lebih cocok untuk peningkatan produktivitas karena komponen peningkatan IP lebih banyak ditentukan oleh ketersediaan air irigasi. Sasaran peningkatan produktivitas Program Opla adalah minimal 0,3 ton/ha. Esensi dari pemberian bantuan paket Opla ini adalah dalam rangka peningkatan produktivitas tanaman padi melalui bantuan faktor produksi untuk menerapkan pemupukan secara lengkap dan berimbang, serta bantuan biaya pengolahan lahan.

Persyaratan untuk menerapkan Program Opla adalah bahwa petani yang menerima bantuan harus menerapkan paket teknologi budi daya padi dengan baik, yaitu dalam bentuk pemupukan berimbang dan menerapkan cara bercocok tanam sistem tanam Jajar Legowo untuk meningkatkan produktivitas padi. Oleh karena ada komponen biaya pengolahan lahan, tentu petani harus melakukan pengolahan tanah dengan baik dengan menggunakan traktor tangan.

Dalam penentuan calon petani dan calon lokasi (CPCL), tampak bahwa kelompok yang dipilih sudah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, antara lain 1) kelompok aktif dan saling berdekatan; 2) memiliki kepengurusan organisasi secara lengkap; 3) bersedia menyusun RUKK; 4) memiliki nomor rekening bank; 5) kesediaan mengikuti seluruh rangkaian Program Opla; 6) sanggup menggunakan dana Program Opla sesuai dengan ketentuan; dan 7) pengguna Program Opla ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pertanian.

Manfaat dari kegiatan Program Opla adalah 1) terlaksananya penerapan inovasi teknologi budi daya tanaman padi, seperti penerapan pemupukan secara lengkap dan berimbang antara penggunaan pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium dari yang semula penggunaan pupuk urea mencapai 300 kg/ha, pada saat penggunaan Program Opla penggunaan urea turun sekitar 50–75 kg/ha; 2) terlaksananya inovasi cara bercocok tanam dengan menggunakan Jajar Legowo yang berdampak dapat meningkatkan produktivitas tanaman padi; 3) terjadinya peningkatan kualitas pengolahan lahan karena terjaminnya biaya pengolahan lahan; 4) terjadinya peningkatan perbaikan fisik tanah karena penggunaan pupuk organik; 5) terjadinya peningkatan produktivitas padi dari 4–5 kg per ubinan menjadi 4,4–6,2 kg per ubinan; dan 6) terjadinya peningkatan kualitas gabah, dengan indikasi sebelum terjadi Opla berat gabah per karung rata-rata 40 kg, setelah terjadinya OPLA berat gabah per karung menjadi 50 kg.

Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT)

Luas lahan sawah wilayah Kabupaten Klaten sebesar 33.230 ha. Program GP-PTT di Kabupaten Klaten ditujukan untuk komoditas padi dan kedelai. Program GP-PTT untuk padi ditargetkan 2.500 ha dan sudah terealisasi (100%). Demikian juga halnya untuk komoditas kedelai, Program GP-PTT untuk Kedelai ditargetkan 1.000 ha dan sudah terealisasi (100%).

Hasil ubinan usaha tani padi pada Kegiatan GP-PTT di Kecamatan Prambanan diperoleh hasil sebagai berikut: a) produktivitas hasil ubinan tertinggi diperoleh oleh Kelompok Bumi Asri II, Desa Taji mencapai hasil sebesar 8,66 ton/ha; b) produktivitas hasil ubinan terendah diperoleh oleh Kelompok Margo Rukun I dan II, Desa Pareng mencapai hasil sebesar 6,53 ton/ha; dan c) secara rata-rata produktivitas Program GP-PTT di Kecamatan Prambanan hasil ubinan sebesar 7,34 ton/ha.

Kegiatan GP-PTT di Kecamatan Karangdowo dilakukan di 30 kelompok tani yang tersebar di 18 desa merefleksikan beberapa hal sebagai berikut: a) produktivitas hasil ubinan tertinggi diperoleh oleh Kelompok Tani Dadi Mulyo, Desa Tumpukan mencapai hasil sebesar 9,14 ton/ha; b) produktivitas hasil ubinan terendah diperoleh oleh Kelompok Tani Mulyo, Desa Karang Talun mencapai hasil sebesar 6,23 ton/ha; dan c) secara rata-rata produktivitas Program GP-PTT di Kecamatan Prambanan hasil ubinan sebesar 7,95 ton/ha.

Kegiatan GP-PTT di Kecamatan Manisrenggo dilakukan di 37 kelompok tani yang tersebar di 15 desa diperoleh hasil sebagai berikut: a) produktivitas hasil ubinan tertinggi diperoleh oleh Kelompok Tani Bakti, Desa Taskombang mencapai hasil sebesar 6,80 ton/ha; b) produktivitas hasil ubinan terendah diperoleh oleh Kelompok Tani Subur, Desa Kepurun mencapai hasil sebesar 6,00 ton/ha; dan c) secara rata-rata produktivitas Program GP-PTT di Kecamatan Manisrenggo hasil ubinan sebesar 6,33 ton/ha.

Bantuan Alsintan

Pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) berperan sangat penting dalam pembangunan pertanian. Pentingnya bantuan alsintan ini dilandasi beberapa argumen sebagai berikut: 1) tenaga kerja manusia dibidang pertanian sudah semakin langka; 2) ongkos upah tenaga kerja untuk kegiatan pengolahan tanah, tanam, pemeliharaan, serta panen dan pascapanen makin meningkat; 3) kegiatan usaha tani dengan tenaga kerja manusia mahal dan memerlukan waktu lama; 4) kehilangan hasil panen saat panen dan pascapanen cukup tinggi; 5) mutu hasil panen relatif masih rendah; dan (6) pendapatan petani yang relatif rendah.

Sumber dana dalam bantuan alsintan dapat berasal dari beberapa sumber dana, antara lain APBN, APBD, DAK, dana *Refocusing*, Ditjen Teknis terkait prasarana dan sarana pertanian (alsintan), bantuan pemerintah provinsi, APBNP, hadiah/hibah, dan swadaya masyarakat. Terkait dengan bantuan alsintan mendukung Program Upsus Pajale bersumber dari 1) dana *refocusing* tahun 2014 untuk tahun 2015; 2) APBN tahun 2015; dan 3) APBNP tahun 2015.

Dana APBN 2015 sudah realisasi *hand tractor* roda 2 sebanyak 25 unit, 5 unit pompa air, dan 6 unit *corn sheller*. Dana APBNP 2015 sudah realisasi 17 unit *mini combine harvester*, 5 *power thresher*, dan 1 *vertical dryer* untuk jagung. Bantuan alsintan lainnya masih dalam proses administrasi di tingkat provinsi yang mencakup identifikasi kebutuhan yang diminta, proses pengadaan, dan proses lelang. Dana *refocusing* tahun 2015 sudah realisasi sebanyak 24 *hand traktor* roda 2.

PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM UPSUS PADI

Target Tanam 2014/15 dan Tahun 2015

Sasaran awal luas tanam padi pada periode Oktober 2014–Maret 2015 di Kabupaten Klaten seluas 38.177 ha. Informasi secara lebih terperinci sasaran luas tanam padi periode Oktober 2014–Maret 2015 dapat dilihat pada Tabel 3. Sasaran luas tanam padi pada periode April–September 2015 seluas 24.641 ha. Berdasarkan sasaran luas tanam Oktober 2014–Maret 2015 dan sasaran luas tanam April–September 2015 diperoleh sasaran luas tanam padi total periode Oktober 2014–September 2015 seluas 62.838 ha. Informasi secara lengkap tentang sasaran luas tanam padi di Kabupaten Klaten menurut kecamatan dapat disimak pada Tabel 3.

Tabel 3. Target luas tanam padi di Kabupaten Klaten menurut kecamatan, Oktober 2014–Maret 2015 (Okmar), April–September 2015 (Asep)

No.	Kecamatan	Luas sawah (ha)	Target luas tanam padi (ha)		
			Okmar 2014/2015	Asep 2015	Total
1.	Prambanan	1.129	1.129	731	1.860
2.	Gantiwarno	1.671	1.671	1.155	2.826
3.	Wedi	1.762	1.762	505	2.267
4.	Bayat	1.276	1.276	227	1.503
5.	Cawas	3.560	3.560	1.588	5.148
6.	Trucuk	2.684	2.684	850	3.534
7.	Kalikotes	1.140	1.140	516	1.656
8.	Kebonarum	883	883	867	1.750
9.	Jogonalan	1.441	1.441	939	2.380
10.	Manisrenggo	1.829	1.829	1.295	3.124
11.	Karangnongko	848	848	589	1.437
12.	Ngawen	1.081	1.081	1.110	2.191
13.	Ceper	2.002	2.002	754	2.756
14.	Pedan	1.271	1.271	354	1.625
15.	Karangdowo	2.617	2.617	2.460	5.077
16.	Juwiring	1.962	1.962	2.017	3.979
17.	Wonosari	2.293	2.293	1.781	4.074
18.	Delanggu	1.597	1.597	2.072	3.669
19.	Polanharjo	2.020	2.020	2.009	4.029
20.	Karanganom	1.420	1.420	974	2.394
21.	Tulung	1.596	1.596	287	1.883
22.	Jatinom	525	525	296	821
23.	Kemalang	105	105	79	184
24.	Klaten Selatan	987	987	610	1.597
25.	Klaten Tengah	273	273	373	646
26.	Klaten Utara	225	225	203	428
Jumlah		38.197	38.197	24.641	62.838

Sumber: BPS Kabupaten Klaten (2015)

Target Agregat Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi

Dari Tabel 4 memberikan informasi tentang beberapa target yang ditetapkan di tingkat Kabupaten Klaten, yaitu 1) target luas tanam ditetapkan seluas 62.838 ha; 2) target luas panen ditetapkan seluas 62.688 ha; 3) target produktivitas ditetapkan sebesar 62,87 ku/ha; dan 4) berdasarkan luas panen dan produktivitas ditetapkan target produksi sebesar 394.160 ton. Target-target tersebut didasarkan atas potensi sumber daya lahan sawah, infrastruktur irigasi, kondisi iklim, dan program-program pendukung Upsus Padi.

Tabel 4. Target luas tanam, luas panen, produktivitas, dan produksi padi

No.	Uraian	Padi
1.	Luas tanam (ha)	62.838
2.	Luas panen (ha)	62.688
3.	Produktivitas (ku/ha)	62,87
4.	Produksi (ton)	394.160

Sumber: Disperta Kabupaten Klaten (2015)

Capaian Luas Tanam Periode Oktober 2014–Maret 2015

Capaian luas tanam padi pada periode Oktober 2014–Maret 2015 di Kabupaten Klaten adalah seluas 35.949 ha atau mencapai 94,11%. Belum tercapainya luas tanam pada periode Oktober 2014–Maret 2015 di beberapa kecamatan disebabkan terjadinya curah hujan tinggi yang menyebabkan meluapnya air terutama Daerah Aliran Sungai Dengkeng. Beberapa kecamatan yang terkena dampak adalah Kecamatan Manisrenggo, Prambanan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, dan Cawas. Sementara itu, di beberapa kecamatan lain disebabkan adanya perubahan iklim sehingga waktu tanam mengalami mundur. Informasi secara lebih terperinci informasi tentang capaian atau realisasi luas tanam pada periode Oktober 2014–Maret 2015 menurut kecamatan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Realisasi luas tanam padi lahan sawah di Kabupaten Klaten menurut kecamatan (ha), Oktober 2014–Maret 2015

No.	Kecamatan	Luas sawah (ha)	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Maret	Oktober–Maret	
									ha	%
1.	Prambanan	1.129	6	22	446	307	121	299	1.201	106,38
2.	Gantiwarno	1.671	-	294	730	176	58	94	1.352	80,91
3.	Wedi	1.762	25	207	775	192	81	197	1.477	83,83
4.	Bayat	1.276	-	528	196	2	5	379	1.110	86,99
5.	Cawas	3.560	-	378	1.876	-	-	247	2.501	70,25
6.	Trucuk	2.684	-	-	1.803	30	-	-	1.833	68,29
7.	Kalikotes	1.140	-	52	595	65	1	66	779	68,33
8.	Kebonarum	883	164	125	112	139	179	187	906	102,60
9.	Jogonalan	1.441	44	94	709	446	140	365	1.798	124,77
10.	Manisrenggo	1.829	-	138	991	-	340	595	2.064	112,85
11.	Karangnongko	848	193	177	228	110	100	168	976	115,09
12.	Ngawen	1.081	61	235	241	158	181	259	1.135	105,00
13.	Ceper	2.002	47	83	926	147	102	148	1.453	72,58
14.	Pedan	1.271	65	9	486	280	49	5	894	70,34
15.	Karangdowo	2.617	61	98	1.213	551	141	30	2.094	80,02
16.	Juwiring	1.962	269	285	293	384	325	194	1.750	89,19
17.	Wonosari	2.293	439	472	593	395	463	453	2.815	122,76
18.	Delanggu	1.597	139	149	177	128	324	247	1.164	72,89
19.	Polanharjo	2.020	439	217	395	557	415	312	2.335	115,59
20.	Karanganom	1.420	189	316	409	440	329	335	2.018	142,11
21.	Tulung	1.596	361	478	251	392	334	349	2.165	135,65
22.	Jatinom	525	23	82	37	157	63	96	458	87,24
23.	Kemalang	105	28	-	-	-	46	-	74	70,48
24.	Klaten Selatan	987	82	191	223	173	111	139	919	93,11
25.	Klaten Tengah	273	40	53	148	62	20	14	337	123,44
26.	Klaten Utara	225	6	36	201	7	21	70	341	151,56
Jumlah		38.197	2.681	4.719	14.054	5.298	3.949	5.248	35.949	94,11

Capaian Luas Tanam Periode April–September 2015

Capaian luas tanam padi pada periode April–September 2015 seluas 30.727 ha atau mencapai 124,70%. Capaian pada periode ini melebihi target karena adanya beberapa program pendukung Upsus Pajale dan di beberapa kecamatan mengalami waktu tanam mundur yang disebabkan adanya perubahan iklim. Berdasarkan realisasi luas tanam Oktober 2014–Maret 2015 dan realisasi luas tanam April–September 2015 diperoleh capaian atau realisasi luas tanam padi total periode Oktober

2014–September 2015 seluas 66.676 ha atau mencapai 106,11%. Informasi secara lengkap tentang realisasi luas tanam padi di Kabupaten Klaten menurut kecamatan dapat disimak pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Realisasi luas tanam padi lahan sawah di Kabupaten Klaten menurut kecamatan (ha), April–September 2015 dan Oktober 2014–September 2015

No.	Kecamatan	Luas sawah (ha)	April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Apr-Sept		Okt-Sept	
									ha	%	ha	%
1.	Prambanan	1.129	580	160	100	6	-	35	881	120,52	2.082	111,94
2.	Gantiwarno	1.671	555	446	107	80	21	103	1,312	113,59	2.664	94,27
3.	Wedi	1.762	980	231	95	18	60	69	1,453	287,72	2.930	129,25
4.	Bayat	1.276	321	5	-	-	154	22	502	221,15	1.612	107,25
5.	Cawas	3.560	1.968	19	-	-	311	186	2,484	156,42	4.985	96,83
6.	Trucuk	2.684	1.816	-	-	64	324	-4	2,200	258,82	4.033	114,12
7.	Kalikotes	1.140	517	132	-	24	9	5	687	133,14	1.466	88,53
8.	Kebonarum	883	136	123	133	185	131	78	786	90,66	1.692	96,69
9.	Jogonalan	1.441	404	209	229	103	43	215	1,203	128,12	3.001	126,09
10.	Manisrenggo	1.829	360	159	92	99	111	44	865	66,80	2.929	93,76
11.	Karangnongko	848	304	190	217	136	193	144	1,184	201,02	2.160	150,31
12.	Ngawen	1.081	255	280	159	107	213	136	1,150	103,60	2.285	104,29
13.	Ceper	2.002	588	390	113	101	90	38	1,320	175,07	2.773	100,62
14.	Pedan	1.271	543	92	21	54	6	6	722	203,95	1.616	99,45
15.	Karangdowo	2.617	573	1.104	132	72	482	321	2,684	109,11	4.778	94,11
16.	Juwiring	1.962	228	365	469	188	259	179	1,688	83,69	3.438	86,40
17.	Wonosari	2.293	434	303	574	327	337	251	2,226	124,99	5.041	123,74
18.	Delanggu	1.597	148	169	239	382	381	111	1,430	69,02	2.594	70,70
19.	Polanharjo	2.020	453	443	474	312	481	513	2,676	133,20	5.011	124,37
20.	Karanganom	1.420	147	231	236	190	148	121	1,073	110,16	3.091	129,11
21.	Tulung	1.596	279	54	62	41	27	24	487	169,69	2.652	140,84
22.	Jatinom	525	116	77	16	30	10	8	257	86,82	715	87,09
23.	Kemalang	105	-	-	19	27	-	0	46	58,23	120	65,22
24.	Klaten Selatan	987	126	228	123	107	196	96	876	143,61	1.795	112,40
25.	Klaten Tengah	273	126	120	17	14	33	6	316	84,72	653	101,08
26.	Klaten Utara	225	101	54	27	11	13	13	219	107,88	560	130,84
Jumlah		38.197	12.058	5.584	3.654	2.678	4.033	2720	30.727	124,70	66.676	106,11

Capaian Luas Panen dan Angka Ramalan Produksi serta Provitas 2015

Secara agregat, capaian luas panen padi di Kabupaten Klaten pada periode Januari–April tahun 2015 mencapai 26.330 ha dan pada periode Mei–Agustus tahun 2015 mencapai 27.008 ha. Angka ramalan luas panen September–Desember tahun 2015 sebesar 11.788 ha. Berdasarkan data realisasi panen Januari–Agustus dan angka ramalan September–Desember maka diperoleh angka luas panen Januari–Desember 2015 sebesar 65.126 ha. Sementara itu, data luas panen pada tahun 2013 seluas 61.638 ha dan pada tahun 2014 seluas 63.702 ha. Jika luas panen 2015 dibandingkan dengan tahun 2013 maka luas panen mengalami peningkatan sebesar 5,36%/tahun dan jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 2,19%/tahun. Hal tersebut mengandung arti bahwa implementasi Program Upsus Pajale telah meningkatkan IP di Kabupaten Klaten. Informasi secara keseluruhan tentang realisasi panen padi sawah di Kabupaten Klaten menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Realisasi panen padi sawah menurut kecamatan di Kabupaten Klaten, 2015

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Total
1.	Prambanan	23	50	446	307	93	299	580	160	151	2.109
2.	Gantiwarno	85	266	355	625	121	94	539	189	98	2.372
3.	Wedi	50	108	496	787	173	103	502	505	167	2.891
4.	Bayat	-	-	724	2	14	496	191	8	0	1.435
5.	Cawas	-	-	1.898	336	-	244	1.801	190	0	4.469
6.	Trucuk	-	-	1.535	299	-	33	1.700	84	0	3.651
7.	Kalikotes	4	-	362	329	25	10	315	200	17	1.262
8.	Kebonarum	164	125	112	139	179	187	136	123	49	1.214
9.	Jogonalan	44	94	709	446	140	365	404	209	233	2.644
10.	Manisrenggo	-	138	991	-	340	595	360	159	0	2.583
11.	Karangnongko	99	100	267	135	374	152	244	210	157	1.738
12.	Ngawen	61	235	241	158	181	259	255	280	178	1.848
13.	Ceper	63	67	599	406	119	106	481	606	208	2.655
14.	Pedan	27	16	486	261	68	5	543	70	5	1.481
15.	Karangdowo	80	103	598	959	276	59	475	1.205	310	4.065
16.	Juwiring	204	181	223	482	306	207	201	512	264	2.580
17.	Wonosari	294	472	492	472	472	448	369	443	336	3.798
18.	Delanggu	140	90	147	140	323	246	188	251	129	1.654
19.	Polanharjo	439	217	395	547	425	312	453	443	487	3.718
20.	Karanganom	189	316	404	425	327	335	147	231	192	2.566
21.	Tulung	345	492	294	378	329	362	273	54	63	2.590
22.	Jatinom	55	120	40	157	63	96	116	77	24	748
23.	Kemalang	52	-	-	-	19	27	-	-	0	98
24.	Klaten Selatan	99	171	183	196	117	131	125	232	122	1.376
25.	Klaten Tengah	56	13	130	94	46	9	121	92	33	594
26.	Klaten Utara	6	36	201	7	21	70	101	54	12	508
Jumlah		2.579	3.410	12.328	8.087	4.551	5.250	10.620	6.587	3.235	56.647

Angka produktivitas padi pada periode Januari–April 2015 mencapai 65,28 ku/ha, sedangkan produktivitas pada periode Mei–Agustus hanya sebesar 56,91 ku/ha, sementara itu angka ramalan produktivitas periode September–Desember diperkirakan 62,10 ku/ha. Secara rata-rata pada periode Januari–Desember 2015 diperoleh besaran produktivitas padi sebesar 61,23 ku/ha. Sementara itu, angka produktivitas di Kabupaten Klaten pada tahun 2013 sebesar 59,65 ku/ha dan pada tahun 2014 sebesar 54,15 ku/ha. Dengan demikian, produktivitas mengalami peningkatan dari 59,65 ku/ha (2013) dan 54,15 ku/ha (2014) menjadi 61,23 ku/ha (2015) atau mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,65%/tahun dan 13,07%/tahun dengan adanya Program Upsus Pajale. Artinya, bahwa Program Upsus Padi telah memberikan dampak pada level moderat jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan memberikan dampak yang besar jika dibandingkan dengan tahun 2014.

Berdasarkan data luas panen dan produktivitas padi diperoleh angka produksi padi di Kabupaten Klaten, angka realisasi produksi padi pada periode Januari–April 2015 sebesar 171.882 ton, angka realisasi produksi padi pada bulan Mei–Agustus 2015 sebesar 153.703 ton, dan angka ramalan produksi padi September–Desember sebesar 73.203 ton. Dengan demikian, jumlah produksi padi secara keseluruhan dalam satu tahun mencapai 398.788 ton. Data rekapitulasi tentang realisasi luas tanam, luas panen, produktivitas, dan produksi padi dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Luas tanam, luas panen, dan produksi padi di Kabupaten Klaten, Angka Ramalan (Aram) II, 2015 (GKG)

No.	Uraian	Realisasi					Ramalan	Jumlah
		Jan-Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Jumlah Mei-Ags	Sep-Des Jan-Des
1.	Luas panen (ha)	26.330	4.551	5.250	10.620	6.587	27.008	11.788 65.126
2.	Luas tan akhir bulan (ha), kolom (3) akhir <i>subround</i>	22.670				11.788		
3.	Luas tanam (ha)	26.539	5.584	3.654	2.678	4.033	15.949	
4.	Luas puso (ha)	25	3	0	0	0	3	
5.	Hasil per hektar (ku)	65,28					56,91	62,10 61,23
6.	Produksi (ton)	171.882					153.703	73.203 398.788

Sumber: BPS Kabupaten Klaten (2015)

Berdasarkan target luas tanam padi yang ditetapkan, yaitu 1) target luas lahan sawah seluas 38.197 ha dan tercapai 38.197 ha atau terealisasi 100%; 2) target luas tanam periode Oktober 2014–Maret 2015 seluas 38.197 ha dan tercapai 35.949 ha atau terealisasi 94,11%; 3) target luas tanam periode April–September 2015 seluas 24.641 ha dan tercapai 30.727 ha atau terealisasi 126,65%; dan 4) target luas tanam periode Oktober 2014–September 2015 seluas 62.338 ha dan tercapai 66.676 ha atau terealisasi 126,65%. Tidak tercapainya target pada periode Oktober 2014–Maret 2015 dan terlampaunya target periode April–September 2015 disebabkan dua faktor utama, yaitu mundurnya awal jatuhnya musim hujan dan keberhasilan program-program pendukung Upsus Padi.

Berdasarkan target luas panen, produktivitas, dan produksi padi yang ditetapkan untuk Kabupaten Klaten, yaitu 1) target luas panen periode Oktober 2014–September 2015 seluas 62.688 ha dan tercapai 65.126 ha atau terealisasi 103,89%; 2) target produktivitas rata-rata pada tahun 2015 ditetapkan sebesar 62,87 ku/ha dan tercapai sebesar 61,23 ku/ha atau terealisasi sebesar 97,39%; dan 3) target produksi padi pada tahun 2015 ditetapkan sebesar 394.160 ton dan tercapai sebesar 398.788 ton atau terealisasi sebesar 101,17%. Hasil kajian menunjukkan bahwa semua target tercapai dengan baik, kecuali produktivitas yang hanya mencapai 97,39%. Ke depan masalah adopsi teknologi dan pemberdayaan petani harus mendapatkan perhatian yang serius, bukan saja untuk mencapai target, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan Program Upsus Padi.

PERMASALAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDUKUNG PROGRAM UPSUS PADI

Permasalahan Program GP-PTT

Beberapa permasalahan pokok dalam pelaksanaan program GP-PTT, yaitu 1) proses sosialisasi Program GP-PTT kurang melalui proses sosial matang; 2) pemahaman terhadap tujuan program belum dipahami secara utuh baik oleh pendamping dan kelompok sasaran; 3) penetapan sasaran produktivitas pelaksanaan Program GP-PTT dipandang terlalu tinggi; 4) belum diketahuinya prinsip-prinsip PTT dan GP-PTT secara utuh oleh kelompok sasaran; 5) kurang tersedianya teknologi spesifik lokasi; 6) lemahnya kemampuan dalam identifikasi akar permasalahan; 7) belum dipahaminya teknologi pemupukan secara lengkap dan berimbang; 8) beberapa daerah sentra produksi dengan pola tanam (padi-padi-padi) merupakan daerah endemik OPT tertentu terutama tikus, wereng, keong emas, *blast*, beluk, dan sundep; 9) kurangnya pemahaman tentang manfaat dan keuntungan menerapkan teknologi PTT/G-PTT; 10) sulitnya menentukan lokasi program G-PTT yang memenuhi persyaratan yang bukan daerah endemik OPT tertentu; 11) kurangnya ketersediaan alsintan terutama *transplanter* dan *mini combine harvester*; 12) kurangnya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh pertanian; 13) kecilnya dana operasional pendampingan terutama tenaga penyuluh pertanian; dan 14) jatuhnya harga pada saat musim panen raya. Meskipun cukup banyak masalah yang dihadapi, dengan adanya Program Upsus Padi banyak persoalan terkait aspek teknis dan ekonomi dapat dipecahkan melalui Program GP-PTT karena program ini memfokuskan pada aspek teknologi dan bantuan biaya pengolahan tanah.

Permasalahan Program RJIT

Permasalahan pokok dalam pelaksanaan Program RJIT adalah 1) jaringan irigasi tersier yang mengalami kerusakan sangat banyak, sedangkan program bantuan sangat terbatas dengan lokasi tersebar; 2) harga bahan bangunan dan upah tenaga kerja lebih tinggi dari pagu DIPA; 3) sistem koordinasi yang belum sepenuhnya efektif; 4) sinkronisasi antarprogram yang belum terpadu; 5) kelembagaan kelompok yang ada di desa (P3A dan kelompok tani/Gapoktan) belum berbadan hukum (koperasi dan BUMD), namun sebagian P3A sudah akte notaris sehingga tetap dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten; 6) sistem administrasi terlalu kaku sehingga menyulitkan pelaksana di lapangan dan dalam mempertanggungjawabkan keuangan.

Permasalahan Optimasi Lahan

Beberapa permasalahan dalam implementasi Program Opla meliputi 1) fenomena serangan OPT terutama tikus, wereng batang coklat, sundep, walang sangit, dan busuk leher batang (*neck blast*); 2) masalah ketersediaan pupuk anorganik terutama urea yang kurang pada saat musim pemupukan; 3) penerapan jajar legowo, sulit untuk diterapkan secara berkelanjutan karena ada resistensi dari regu tanam; 4) kesulitan memperoleh tenaga kerja tanam dan panen sehingga mengganggu jadwal tanam dan pola tanam; 5) lemahnya permodalan kelompok tani dan petani; 6) kemampuan pengelolaan *cash flow* para anggota kelompok tani masih rendah; 7) fenomena anjlok harga hasil panen pada panen raya dan lonjak harga saat musim paceklik; 8) belum adanya kelembagaan koperasi sehingga soliditas kelompok dalam menangani berbagai permasalahan terkait usaha tani sangat lemah; 9) koordinasi antara kelembagaan pemerintah, kelembagaan ekonomi, dan kelompok tani belum efektif; 10) keswadayaan masyarakat/petani semakin rendah karena program bantuan pemerintah kurang diiringi dengan pemberdayaan masyarakat petani; 11) kelembagaan panen dengan sistem tebasan yang cenderung merugikan petani; 12) skim kredit, subsidi suku bunga, dan sistem agunan untuk kredit investasi alsintan perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan; 13) distribusi pupuk bersubsidi yang belum memenuhi kriteria enam tepat; dan 14) kebijakan pemerintah terkait sistem penganggaran untuk pembangunan pertanian sering tidak konsisten. Meskipun cukup banyak masalah yang dihadapi dengan adanya Program Upsus Padi banyak persoalan terkait ketersediaan dan kontinuitas air irigasi dapat ditingkatkan karena banyak saluran irigasi yang dibangun dan diperbaiki.

Permasalahan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

Beberapa permasalahan bantuan alsintan dalam mendukung Program Upsus Padi, yaitu 1) harga alsintan masih relatif mahal (traktor, *transplanter*, *combine harvester*, dan *power thresher*); 2) pengetahuan tentang teknis tata cara mengoperasikan alsintan masih kurang terutama untuk *transplanter* dan *combine harvester*; 3) pengetahuan tentang manajemen pengelolaan alsintan terutama manajemen keuangan; 4) alsintan tidak diterapkan di segala medan (*hand tractor*, *transplanter*, *mini combine harvester*) pada lahan berbukit dan lumpur dalam mengalami hambatan yang serius; 5) *mini combine harvester* tidak digunakan pada lahan sawah kedalaman lumpur lebih dari 30 cm, terutama pada panen MH; 6) berdasarkan persepsi dan praktek petani penggunaan *mini combine harvester* menyebabkan tanah keras sehingga menyulitkan waktu pengolahan tanah; 7) adanya retensi sosial dari penggunaan *transplanter* terutama dari regu/kelompok tanam dan penggunaan *combine harvester* dari penebas padi; 8) pemilihan tipe dan spesifikasi dari alsintan diserahkan sepenuhnya ke kelompok penerima, sedangkan kelompok penerima kurang memahami seluk beluk alsintan yang akan diterimanya; 9) terdapat keluhan dari kelompok bahwa pelayanan purna jual sangat lambat dan tidak tersedianya onderdil di pasaran; 10) terbatasnya operator yang menguasai operasional dan pemeliharaan alsintan; 11) manajemen pengelolaan alsintan yang belum profesional terutama dalam manajemen keuangan dan mengatur *cashflow*; 12) pelatihan teknis dan manajemen yang kurang memadai; dan 13) belum berkembangnya perbengkelan alsintan di perdesaan, masih dibantu bengkel motor. Meskipun cukup banyak masalah yang dihadapi dengan adanya Program Upsus Padi banyak persoalan terkait aspek pengelolaan dan percepatan usaha tani dari pengolahan tanah, pompanisasi, penanaman, serta panen dan pascapanen dapat dipecahkan dan dipercepat melalui bantuan berbagai alsintan, seperti *hand tractor*, *transplanter*, *power weeder*, *power thresher*, dan *mini combine harvester*.

STRATEGI KEBIJAKAN

Program GP-PTT

Beberapa strategi kebijakan terkait permasalahan pelaksanaan Program GP-PTT adalah 1) proses sosialisasi Program GP-PTT dilakukan melalui proses sosial yang matang secara bertahap dan berjenjang; 2) pemantapan inovasi dan desiminasi teknologi GP-PTT secara lebih luas; 3) pentingnya menggali sumber-sumber peningkatan produktivitas: a) penggunaan teknologi inovasi G-PTT secara baik, b) perbaikan efisiensi teknis, dan c) pendekatan kawasan; 4) pembekalan tenaga pendamping secara lebih baik dan pelaksanaan pendampingan secara lebih intensif dan berkelanjutan; 5) adanya demplot dan demfarm di masing-masing lokasi (kawasan/kecamatan/desa) yang dilakukan secara partisipatif; 6) mencari akar permasalahan di setiap lokasi, terkait: a) masalah kesuburan lahan, b) ketersediaan air irigasi, c) mutu benih, d) penggunaan pupuk lengkap dan berimbang, e) pengendalian OPT dengan PHT, serta f) panen dan penanganan pascapanen secara prima; 7) introduksi varietas padi tahan OPT dan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu; 8) perlu pembekalan tentang manfaat GP-PTT terhadap kesehatan lingkungan tumbuh tanaman; 9) pengaturan pola tanam dan dengan pengendalian hama secara terpadu; 10) meningkatkan koordinasi tenaga pendamping dari unsur penyuluh pertanian dengan Babinsa; 11) meningkatkan alokasi anggaran bagi tenaga penyuluh pertanian khususnya penyuluh pertanian PNS dan THL; dan 14) stabilisasi harga melalui peningkatan daya serap Bulog ($\geq 10\%$) dari produksi.

Program RJIT

Strategi kebijakan terkait pelaksanaan Program RJIT adalah 1) melakukan efisiensi dalam pembangunan dengan mencari bahan-bahan bangunan yang tersedia setempat; 2) meningkatkan keswadayaan dan partisipasi masyarakat pelaksanaan kegiatan secara swakelola; 3) persyaratan kelompok penerima (P3A) harus berbadan hukum cukup dengan akte notaris; 4) sistem administrasi keproyekan yang lebih sederhana; 5) tahapan pencairan dana dialokasikan lebih besar pada tahap awal pembangunan secara berturut-turut 50%, 30%, dan 20%; dan 6) meningkatkan pendampingan dalam penyusunan proporsal, pelaksanaan di lapang, dan dalam membuat laporan pertanggungjawaban.

Program Opla

Beberapa strategi terkait pelaksanaan Program Optimasi Lahan adalah 1) proses sosialisasi Program Optimasi Lahan secara matang dan bertahap; 2) pelatihan dan pendampingan penerapan inovasi teknologi sistem tanam jajar legowo kepada kelompok atau regu tanam; 3) pengembangan secara lebih luas tentang sistem tanam jajar legowo dengan pemupukan secara lengkap dan berimbang; 4) alokasi anggaran untuk pendampingan dan pemberdayaan petani; 5) peningkatan penggunaan pupuk organik melalui revitalisasi Program APPO dan UPPO di tingkat kelompok tani; dan 6) pengembangan inovasi teknologi integrasi tanaman ternak secara terpadu.

Program Bantuan Alsintan

Strategi kebijakan terkait bantuan alat dan mesin pertanian adalah 1) pentingnya introduksi dan bantuan alsintan bersumber dari pabrikan yang terpercaya; 2) adanya pemantapan inovasi dan diseminasi alsintan jenis baru terutama *transplanter* dan *mini combine harvester*; 3) adanya layanan purna jual yang prima, baik teknis dan ketersediaan onderdil alsintan di tingkat daerah kabupaten/kota; 4) bantuan alsintan diprioritaskan alsintan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (*transplanter*, *mini combine harvester*, *power thresher*, dan *dryer*); 5) pentingnya pemberdayaan kelembagaan UPJA sebagai lembaga pengelola alsintan yang berorientasi bisnis; 6) pengelolaan secara bisnis dengan memperhatikan aspek teknis, manajemen, ekonomi, dan lingkungan; dan 7) pengembangan jejaring usaha UPJA untuk mengembangkan usaha dan menjamin keberlanjutan usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan Program Upsus harus dilakukan penyempurnaan, baik dalam aspek pelaksanaan program, aspek pendukung, dan aspek promosi. Harus ada konsistensi antara yang diformulasikan dalam rumusan kebijakannya dengan implementasi di lapangan. Kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam politik pangan, semangat nasionalisme, kebijakan yang berpihak kepada petani dan produksi dalam negeri harus mewarnai seluruh kebijakan, dan program pembangunan pertanian.

Pada aspek pelaksanaan perlu memperhatikan 1) adanya pedum, juklak, juknis, dan buku panduan yang mudah dipahami dan diimplementasikan di lapang; 2) sosialisasi program secara berkala agar pelaksana dan pendamping termotivasi untuk melaksanakan perannya dengan sebaik-baiknya; 3) pelaksana dan pendamping memiliki kompetensi, baik dalam keterampilan teknis, kapabilitas manajerial, dan melakukan koordinasi secara efektif sehingga mampu menggerakkan kelompok sasaran secara dinamis; 4) pendampingan secara berkala sehingga tujuan tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan; 5) monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan data dan informasi serta umpan balik yang berguna untuk penyempurnaan program dan pemecahan permasalahan di lapangan.

Pada aspek pendukung perlu dilakukan 1) perencanaan kebutuhan benih/bibit, pupuk, dan pestisida, serta alsintan dalam satu kelompok sasaran, satu kawasan, dan satu wilayah secara tepat; 2) perlu pembangunan infrastruktur irigasi dalam suatu sistem keseluruhan jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta alat dan mesin pertanian; 3) perlu ketersediaan dan akses terhadap sumber permodalan dengan bunga rendah; 4) lembaga pasar untuk menampung kelebihan produksi pada saat panen raya (pasar tani/pasar desa, koperasi, BUMD, dan Bulog); dan 5) tersedianya alokasi anggaran untuk pengawalan dan pendampingan secara cukup dan tepat sasaran.

Pada aspek promosi perlu dilakukan 1) temu teknis dan temu lapang secara berkala untuk memotivasi pelaksana dan pendamping dan petani peserta program dalam melaksanakan Upsus Padi secara lebih baik; 2) advokasi program secara berkala ke pemangku kepentingan tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa tentang manfaat dan pentingnya Program Upsus Padi dalam mendukung pencapaian swasembada pangan berkelanjutan; 3) pentingnya peningkatan pangsa penampungan hasil padi oleh Bulog, peningkatan kualitas beras melalui pengembangan industri penggilingan modern, dan kegiatan promosi bersama bagi produk beras yang dihasilkan petani dengan *trade mark* tertentu yang dihasilkan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. Klaten dalam angka. Klaten (ID): Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. Luas tanam, luas panen dan produksi padi di Kabupaten Klaten, angka ramalan (Aram) II tahun 2015 (gabah kering giling). Klaten (ID): Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.
- [Disperta] Dinas Pertanian Kabupaten Klaten. 2013. Laporan Tahunan. Klaten (ID): Dinas Pertanian Kabupaten Klaten.
- [Disperta] Dinas Pertanian Kabupaten Klaten. 2015. Laporan kegiatan pendukung Program Upsus Pajale di Kabupaten Klaten. Klaten (ID): Dinas Pertanian Kabupaten Klaten.
- Food Agriculture Organization. 2009. How to Feed the World in 2050 [Internet]. [cited 2013 Apr 22]. Available from: http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf.
- Gardner B. 1987. The economic of agricultural policies. New York (US): MacMillan Publishing Company.
- Pope RD, Hallam A. 1986. A confusion of agricultural economist? American Journal of Agricultural Economist. 68(3): 572-594.
- Rausser GC. 1982. Political economic markets: PERTs, and PESTs in food and agriculture. AJAE. 64(5):821-832.
- Rausser GC. 1992. Predatory versus productive government: the case of US agricultural policies. J Econ Perspect. 6(3):133-157.
- Simatupang P. 2003. Analisis kebijakan: Konsep dasar dan prosedur pelaksanaan. AKP. 1(1):1-21.
- Timmer P, Falcon W, Pearson S. 1983. Food: policy analysis. Baltimore (US): John Hopkins University Press.